

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 115/PMK.05/2017
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR 32/PMK.05/2014
TENTANG SISTEM PENERIMAAN NEGARA
SECARA ELEKTRONIK

A. SURAT PERNYATAAN WAJIB PAJAK/WAJIB BAYAR/WAJIB SETOR

KOP SURAT (Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor)

SURAT PERNYATAAN

Nomor:(1).....

Pada hari ini...(2)..., tanggal...(3)...bulan...(4)... tahun...(5)... saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :(6)..... Nomor Identitas :(7).....
menyatakan bahwa telah terjadi kesalahan penginputan nilai nominal/nilai setor pada saat melakukan pembuatan Kode *Billing*(8)..... dalam rangka penyetoran penerimaan negara melalui Bank/Pos(9)..... dan berhasil memperoleh Bukti Penerimaan Negara (BPN), dengan rincian sebagai berikut:

TERTULIS/TRANSAKSI YANG DIBATALKAN

No.	Tanggal Buku	NTPN/NTB/NTP	Akun/Satker	Nilai Setor
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
...

SEHARUSNYA/TRANSAKSI PENGGANTI

No.	Tanggal Buku	NTPN/NTB/NTP	Akun/Satker	Nilai Setor
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
...

Atas kesalahan penyetoran penerimaan negara tersebut:

1. meminta agar dapat dilakukan pembatalan transaksi penerimaan negara sebesar(20)..... dengan NTPN dan NTB/NTP(21).....;
2. tidak akan menggunakan setoran penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada angka 1 sebagai pelunasan atas kewajiban kepada negara;
3. apabila di kemudian hari terdapat penggunaan terhadap setoran penerimaan negara yang telah dibatalkan, kami bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia menyetorkan dana atas transaksi dimaksud ke kas negara.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

.....(22).....,20xx
Saya Yang Menyatakan,

Materai 6000

.....(23).....

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN WAJIB PAJAK/WAJIB BAYAR/WAJIB SETOR

- (1) Diisi dengan Nomor Surat Pernyataan dari WP/WB/WS.
- (2) Diisi dengan nama Hari pada saat Surat Pernyataan dibuat.
- (3) Diisi dengan Tanggal (dengan huruf) pada saat Surat Pernyataan dibuat.
- (4) Diisi dengan nama Bulan pada saat Surat Pernyataan dibuat.
- (5) Diisi dengan Tahun (dengan huruf) pada saat Surat Pernyataan dibuat.
- (6) Diisi nama WP/WB/WS sesuai yang tercantum dalam BPN.
- (7) Diisi nomor identitas sesuai BPN (NPWP/KTP/SIM).
- (8) Diisi dengan nomor Kode Billing transaksi penerimaan Negara yang akan dibatalkan.
- (9) Diisi nama Kantor Cabang/Unit Layanan Lainnya Bank/Pos Persepsi tempat penyetoran dilakukan.
- (10) Diisi nomor urut daftar transaksi Penerimaan Negara yang dibatalkan.
- (11) Diisi Tanggal Buku transaksi Penerimaan Negara yang dibatalkan sesuai BPN.
- (12) Diisi NTPN dan NTB/NTP transaksi Penerimaan Negara yang dibatalkan sesuai BPN.
- (13) Diisi Kode Akun atau Kode Satker transaksi Penerimaan Negara yang dibatalkan sesuai BPN.
- (14) Diisi Nilai Setoran transaksi Penerimaan Negara yang dibatalkan sesuai BPN.
- (15) Diisi nomor urut daftar transaksi Penerimaan Negara pengganti.
- (16) Diisi Tanggal Buku transaksi Penerimaan Negara pengganti sesuai BPN.
- (17) Diisi NTPN dan NTB/NTP transaksi Penerimaan Negara pengganti sesuai BPN.
- (18) Diisi Kode Akun atau Kode Satker transaksi Penerimaan Negara pengganti sesuai BPN.
- (19) Diisi Nilai Setoran transaksi Penerimaan Negara pengganti sesuai BPN.
- (20) Diisi Nilai Setoran transaksi Penerimaan Negara yang dibatalkan sesuai BPN (sebagaimana nomor 14).
- (21) Diisi NTPN dan NTB/NTP transaksi Penerimaan Negara yang dibatalkan sesuai BPN (sebagaimana nomor 12).
- (22) Diisi tempat dan tanggal penandatanganan Surat Pernyataan.
- (23) Diisi nama dan tandatangan WP/WB/WS.

B. SURAT PERNYATAAN KANTOR CABANG/UNIT LAYANAN BANK/POS PERSEPSI

KOP SURAT (Kantor Cabang/Unit Layanan Lainnya Bank/Pos Persepsi)

SURAT PERNYATAAN

Nomor:(1).....

Pada hari ini...(2)..., tanggal...(3)... bulan...(4)... tahun...(5)... saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :(6).....Jabatan :(7).....
menyatakan bahwa benar telah terjadi kelalaian dalam melakukan proses penginputan Kode *Billing*(8).....
dalam rangka menerima setoran penerimaan negara dari(9)..... dan berhasil memperoleh Bukti Penerimaan
Negara (BPN) namun tidak terdapat dana atas transaksi penerimaan negara tersebut, dengan rincian sebagai
berikut:

TERTULIS/TRANSAKSI YANG DIBATALKAN

No.	Tanggal Buku	NTPN/NTB/NTP	Akun/Satker	Nilai Setor
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
...

SEHARUSNYA/TRANSAKSI PENGANTI

No.	Tanggal Buku	NTPN/NTB/NTP	Akun/Satker	Nilai Setor
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
...

Atas kelalaian tersebut, saya, untuk dan atas nama(20)....., bertanggung jawab dan akan segera mengupayakan penyelesaian proses pengajuan permintaan pembatalan kepada KPPN Khusus Penerimaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Mengetahui,
Pimpinan Cabang/Unit
Layanan Lainnya

.....(23).....

.....(21).....,20xx

Petugas Bank/Pos Persepsi

Materai 6000

.....(22).....

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN KANTOR CABANG/UNIT LAYANAN BANK/POS
PERSEPSI

- (1) Diisi dengan Nomor Surat Pernyataan dari Kantor Cabang/Unit Layanan Bank/Pos Persepsi.
- (2) Diisi dengan nama Hari pada saat Surat Pernyataan dibuat.
- (3) Diisi dengan Tanggal (dengan huruf) pada saat Surat Pernyataan dibuat.
- (4) Diisi dengan nama Bulan pada saat Surat Pernyataan dibuat.
- (5) Diisi dengan Tahun (dengan huruf) pada saat Surat Pernyataan dibuat.
- (6) Diisi nama Petugas Bank/Pos Persepsi Yang Melakukan Kelalaian.
- (7) Diisi Jabatan Petugas Bank/Pos Persepsi Yang Melakukan Kelalaian.
- (8) Diisi dengan nomor Kode Billing transaksi penerimaan Negara yang akan dibatalkan.
- (9) Diisi nama WP/WB/WS sesuai yang tercantum dalam BPN.
- (10) Diisi nomor urut daftar transaksi Penerimaan Negara yang dibatalkan.
- (11) Diisi Tanggal Buku transaksi Penerimaan Negara yang dibatalkan sesuai BPN.
- (12) Diisi NTPN dan NTB/NTP transaksi Penerimaan Negara yang dibatalkan sesuai BPN.
- (13) Diisi Kode Akun atau Kode Satker transaksi Penerimaan Negara yang dibatalkan sesuai BPN.
- (14) Diisi Nilai Setoran transaksi Penerimaan Negara yang dibatalkan sesuai BPN.
- (15) Diisi nomor urut daftar transaksi Penerimaan Negara pengganti.
- (16) Diisi Tanggal Buku transaksi Penerimaan Negara pengganti sesuai BPN.
- (17) Diisi NTPN dan NTB/NTP transaksi Penerimaan Negara pengganti sesuai BPN.
- (18) Diisi Kode Akun atau Kode Satker transaksi Penerimaan Negara pengganti sesuai BPN.
- (19) Diisi Nilai Setoran transaksi Penerimaan Negara pengganti sesuai BPN.
- (20) Diisi nama Kantor Cabang/Unit Layanan Bank/Pos Persepsi.
- (21) Diisi tempat dan tanggal penandatanganan Surat Pernyataan.
- (22) Diisi nama dan tandatangan Petugas Bank/Pos Persepsi Yang Melakukan Kelalaian.
- (23) Diisi nama dan tandatangan Pimpinan Cabang/Unit Layanan Bank/Pos Persepsi.

C. SURAT PERMOHONAN PEMBATALAN TRANSAKSI PENERIMAAN NEGARA

KOP SURAT (Kantor Pusat Bank/Pos Persepsi)

SURAT PERMOHONAN PEMBATALAN TRANSAKSI PENERIMAAN NEGARA

Nomor :(1).....

Yth. Kepala KPPN Khusus Penerimaan
Di tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengajukan permohonan pembatalan transaksi penerimaan negara, dengan rincian sebagai berikut:

No. (2)	Tanggal Buku (3)	NTPN, NTB/NTP (4)	Akun/Satker (5)	Nilai Setor (6)
...

Selanjutnya kami bertanggung jawab atas kebenaran permohonan pembatalan transaksi penerimaan negara tersebut diatas dan apabila di kemudian hari terdapat penggunaan terhadap setoran penerimaan negara yang telah dibatalkan, kami bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia menyetorkan dana atas transaksi dimaksud ke kas negara.

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

.....(7).....,20xx

Pimpinan Kantor Pusat Bank/Pos
Persepsi,

.....(8).....

Tembusan:

1.(9).....

2.(10).....

PETUGAS PENGISIAN
SURAT PERMOHONAN PEMBATALAN TRANSAKSI PENERIMAAN NEGARA

- (1) Diisi dengan Nomor Surat Permohonan Pembatalan Transaksi Penerimaan Negara oleh Kantor Pusat Bank/Pos Persepsi.
- (2) Diisi nomor urut daftar transaksi Penerimaan Negara yang dibatalkan.
- (3) Diisi Tanggal Buku transaksi Penerimaan Negara yang dibatalkan sesuai BPN.
- (4) Diisi NTPN dan NTB/NTP transaksi Penerimaan Negara yang dibatalkan sesuai BPN.
- (5) Diisi Kode Akun atau Kode Satker transaksi Penerimaan Negara yang dibatalkan sesuai BPN.
- (6) Diisi Nilai Setoran transaksi Penerimaan Negara yang dibatalkan sesuai BPN.
- (7) Diisi tempat dan tanggal penandatanganan Surat Permohonan Pembatalan Transaksi Penerimaan Negara.
- (8) Diisi nama dan tandatangan Pimpinan Kantor Pusat Bank/Pos Persepsi Yang Menangani Penerimaan Negara.
- (9) Diisi dengan: Direktur Jenderal Pajak atau Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pimpinan Instansi Pemerintah Pemilik Tagihan sesuai jenis Penerimaan Negara yang dibatalkan.
- (10) Diisi dengan: nama KPP atau KPPBC atau Instansi Pemerintah Pemilik Tagihan dimana Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor terdaftar.

D. SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN PEMBATALAN TRANSAKSI PENERIMAAN NEGARA

KOP SURAT KPPN KHUSUS PENERIMAAN

Nomor :(1).....(2).....,20xx
Sifat :(3).....
Lampiran :(4).....
Hal : Penolakan Permohonan Pembatalan
Transaksi Penerimaan Negara

Yth. Direktur Utama(5)....
Di tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor(6)... tanggal(7).... perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa permohonan pembatalan transaksi penerimaan negara, dengan rincian sebagai berikut:

No. (8)	Tanggal Buku (9)	NTPN/NTB (10)	Akun/Satker (11)	Nilai Setor (12)
...

tidak dapat disetujui untuk dilakukan pembatalan transaksi penerimaan negara mengingat belum memenuhi ketentuan yang berlaku.

Demikian agar maklum.

Kepala KPPN Khusus Penerimaan,

.....(13).....

Tembusan:

1.(14).....
2.(15).....

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN PEMBATALAN
TRANSAKSI PENERIMAAN NEGARA

- (1) Diisi dengan Nomor Surat Penolakan Permohonan Pembatalan Transaksi Penerimaan Negara
- (2) Diisi tempat dan tanggal penandatanganan Surat Penolakan Permohonan Pembatalan Transaksi Penerimaan Negara
- (3) Diisi sifat surat Penolakan Permohonan Pembatalan Transaksi Penerimaan Negara
- (4) Diisi jumlah lampiran surat Penolakan Permohonan Pembatalan Transaksi Penerimaan Negara
- (5) Diisi nama Bank/Pos Persepsi
- (6) Diisi nomor surat permohonan pembatalan transaksi penerimaan negara dari Bank/Pos Persepsi
- (7) Diisi tanggal surat permohonan pembatalan transaksi penerimaan negara dari Bank/Pos Persepsi
- (8) Diisi nomor urut daftar transaksi Penerimaan Negara yang dibatalkan
- (9) Diisi Tanggal Buku transaksi Penerimaan Negara yang dibatalkan sesuai BPN
- (10) Diisi NTPN dan NTB/NTP transaksi Penerimaan Negara yang dibatalkan sesuai BPN
- (11) Diisi Kode Akun atau Kode Satker transaksi Penerimaan Negara yang dibatalkan sesuai BPN
- (12) Diisi Nilai Setoran transaksi Penerimaan Negara yang dibatalkan sesuai BPN
- (13) Diisi nama dan tandatangan Kepala KPPN Khusus Penerimaan
- (14) Diisi dengan: Direktur Jenderal Pajak atau Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pimpinan Instansi Pemerintah Pemilik Tagihan sesuai jenis Penerimaan Negara yang dibatalkan.
- (15) Diisi dengan: nama KPP atau KPPBC atau Instansi Pemerintah Pemilik Tagihan dimana Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor terdaftar.

E. SURAT PERSETUJUAN PEMBATALAN TRANSAKSI PENERIMAAN NEGARA

KOP SURAT KPPN KHUSUS PENERIMAAN

Nomor :(1).....(2).....,20xx
Sifat :(3).....
Lampiran :(4).....
Hal : Persetujuan Pembatalan Transaksi Penerimaan Negara

Yth. 1. Direktur Utama(5).....2.Direktur Jenderal(6).....
3. Kepala Satuan Kerja(7).....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor(8).... tanggal(9).... perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa permohonan pembatalan transaksi penerimaan negara, dengan rincian sebagai berikut:

No. (10)	Tanggal Buku (11)	NTPN/NTB (12)	Akun/Satker (13)	Nilai Setor (14)
...

telah dilakukan pembatalan transaksi penerimaan negara, selanjutnya diminta kepada Saudara untuk melakukan proses selanjutnya pada masing-masing *database* sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian agar maklum.

Kepala KPPN Khusus Penerimaan,

.....(15).....

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan
2.(16).....

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERSETUJUAN PEMBATALAN TRANSAKSI PENERIMAAN NEGARA

- (1) Diisi dengan Nomor Surat Persetujuan Pembatalan Transaksi Penerimaan Negara
- (2) Diisi tempat dan tanggal penandatanganan Surat Persetujuan Pembatalan Transaksi Penerimaan Negara
- (3) Diisi sifat surat Persetujuan Pembatalan Transaksi Penerimaan Negara
- (4) Diisi jumlah lampiran pada surat Persetujuan Pembatalan Transaksi Penerimaan Negara
- (5) Diisi nama Bank/Pos Persepsi
- (6) Diisi nama Unit Eselon I pemilik tagihan atas transaksi penerimaan negara yang dibatalkan (DJA/DJP/DJBC)
- (7) Diisi nama Satuan Kerja/instansi pemilik tagihan untuk setoran PNBPN/Non Anggaran
- (8) Diisi nomor surat permohonan pembatalan transaksi penerimaan negara dari Bank/Pos Persepsi
- (9) Diisi tanggal surat permohonan pembatalan transaksi penerimaan negara dari Bank/Pos Persepsi
- (10) Diisi nomor urut daftar transaksi Penerimaan Negara yang dibatalkan
- (11) Diisi Tanggal Buku transaksi Penerimaan Negara yang dibatalkan sesuai BPN
- (12) Diisi NTPN dan NTB/NTP transaksi Penerimaan Negara yang dibatalkan sesuai BPN
- (13) Diisi Kode Akun atau Kode Satker transaksi Penerimaan Negara yang dibatalkan sesuai BPN
- (14) Diisi Nilai Setoran transaksi Penerimaan Negara yang dibatalkan sesuai BPN
- (15) Diisi nama, NIP dan tandatangan Kepala KPPN Khusus Penerimaan
- (16) Diisi nama KPPN Mitra Kerja KPP/KPPBC/Instansi Pemerintah Pemilik Tagihan

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAMATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian

ttd.

ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001